



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **WISNU SUNARTO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **508162**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 405.000.000

1. Tanah Seluas 156 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 35.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/50 m2 di KAB / KOTA  
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 439 m2/50 m2 di KAB / KOTA  
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 95.000.000

1. MOBIL, XENIA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.  
50.000.000
2. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.  
4.000.000
3. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.  
4.000.000
4. MOTOR, HONDA STAR RODA DUA Tahun 1997, HASIL SENDIRI  
Rp. 2.000.000
5. MOTOR, AEROX RODA 2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
15.000.000
6. MOTOR, SCOPY RODA 2 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 249.362.823



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	749.362.823
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	749.362.823

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.